

ASPIRASI

Demo dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Semester II Tahun 2013 diwarnai demonstrasi dan penyampaian aspirasi masyarakat kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Demo tersebut rata-rata berupa penyampaian aduan mengenai pelanggaran dalam pengelolaan keuangan daerah dan atau sekaligus permintaan audit. Atas Demo tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa setiap pengaduan pasti akan dicatat, dan apabila aduan tersebut disertai dengan bukti-bukti valid, maka aduan tersebut akan lebih mudah untuk ditindaklanjuti pada saat pemeriksaan. Adapun mengenai permintaan audit, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan melihat rencana kerja pemeriksaan dan jika audit investigatif, maka harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan disertai dasar/bukti yang kuat.



Demonstrasi selama semester II tahun 2013 terjadi sebanyak lima kali, dengan data sebagai berikut:

1. **Forum Mahasiswa Pemerhati Transparansi Publik Konawe Utara**, Tanggal 22 Juli 2013, menyampaikan informasi awal dugaan penyalahgunaan keuangan daerah bagi perencanaan pemeriksaan Kabupaten Konawe Utara.
2. **Konsorsium Penyelamat Rakyat Konawe Utara**, tanggal 19 Agustus 2013, menyampaikan pengaduan indikasi korupsi oleh pejabat daerah Konawe Utara.
3. **Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GEMPUR SUL-TRA)**, Tanggal 10 September 2013, menyampaikan pengaduan dugaan penyelewengan di Kabupaten Bombana.
4. **PMII Cabang Kendari**, Tanggal 28 Oktober 2013, menyampaikan masalah pertambangan Sultra dan kesejahteraan rakyat
5. **Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM) Sultra**, Tanggal 25 November 2013, menyampaikan pengaduan proyek pengadaan PDAM di Kabupaten Muna.



tim Redaksi

Pengarah
Nelson Ambarita

Penanggung Jawab
Erwin Djuty Prabowo

Pimpinan Redaksi
Ninie Anjarwati

Kontributor
Muhammad Lukman,
Anlinda M. Sholikhah, Pratomu Satrio Wibowo, Sukriadin, Yudi Kurniawan, Antoni Rizaldi Anwar.

Layout
M. Mahmudi

website
kendari.bpk.go.id

Alamat
Jl. Sao-Sao No. 10 Kendari, Sulawesi Tenggara
Telp. 0401-3129385
Fax 0401-3129441
Email: hukmasbpkri_sultra@yahoo.co.id

MEDIA WORKSHOP

Media Workshop BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Dengan Media Massa

Dalam rangka menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan media massa di wilayah Sulawesi Tenggara, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan acara Media Workshop yang dihadiri oleh undangan dari media massa di wilayah Sulawesi Tenggara dan pejabat struktural. Acara tersebut dilaksanakan dua kali, yaitu pada hari Jumat, tanggal 22 November 2013 dan pada tanggal 4 Desember 2013, bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan.



Tema Media Workshop yang pertama adalah "Badan Pemeriksa Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Termasuk Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah". Sedangkan Tema Media Workshop yang kedua adalah "Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah".

Pada dua kesempatan tersebut, kepala perwakilan, Nelson Ambarita, menyampaikan beberapa informasi antara lain dasar hukum BPK, mekanisme pengajuan permintaan informasi berupa wawancara atau permintaan informasi lainnya oleh media massa, serta gambaran umum pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Setelah pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Banyak pertanyaan seputar dasar-dasar pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara yang diajukan oleh para peserta. Diskusi dan tanya jawab berlangsung secara antusias dan menarik.

Kepala perwakilan menutup acara Media Workshop dengan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan media massa atas peran sertanya dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah melalui pemberitaan dan berpesan agar selalu menjaga hubungan dan kerja sama yang baik.

melalui pemberitaan dan berpesan agar selalu menjaga hubungan dan kerja sama yang baik.

Mereka yang datang.....

 Armadi Cahaya Putra dari AKN 3 ke Subaud Sultra I	 Endar Prabowo dari AKN 2 ke Subaud Sultra I
 Pestan Samosir dari AKN 4 ke Subaud Sultra I	 Rahmat Hidayat dari Biro Umum ke Subbag SDM
 Ari Prasetyo Wibowo dari Subbag Keuangan ke Biro Keuangan	 Dhimas Kosamahardi dari BPK Pwk Jatim ke Subbag Hukumas

Mereka yang pergi.....

 Luriani Tria Heriyuniarti dari Subaud Sultra II ke BPK Pwk Jatim	 Irwan Adriyanto dari Subaud Sultra II ke AKN IV
 Iwan dari Subbag Hukumas ke Balai Diklat Makassar	 Nova Yuanina dari Subaud Sultra I ke AKN V
 Yustina Guling dari Subbag Umum ke BPK Pwk Kaltim	 M. Deny Prasetyo dari Subaud Sultra I ke AKN VII



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Catatan Redaksi

Pada edisi ketiga kabarano periode Juli - Desember 2013, Redaksi mewartakan kegiatan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara selama Semester II yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta kegiatan-kegiatan Perwakilan lainnya.

Kegiatan selama semester II tahun 2013 ini antara lain adalah pergantian pimpinan di perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, kunjungan kerja dari Anggota IV dan Anggota VI BPK RI, dan kegiatan lainnya seperti penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan, Media Workshop dengan Media Massa serta penyampaian aspirasi masyarakat melalui unjuk rasa.

Redaksi

- 1 Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan
- 2 Kunjungan Anggota IV Rakor Percepatan TLHP
- 3 Upacara HUT RI ke 68 Pelantikan PNS Penyerahan LHP
- 4 Demo dan Aspirasi Masyarakat Media Workshop

Serah Terima Jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara



BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan acara "Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tenggara". Acara ini dilaksanakan di Ballroom Swiss-belHotel Kendari pada tanggal 22 Oktober 2013. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 296/K/X-X.3/09/2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II pada Pelaksana Badan Pemeriksa keuangan, Nelson Ambarita, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Auditorat NTB I BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, diangkat menjadi Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang baru, menggantikan Didi Budi Satrio, yang mutasi menjadi Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Acara sertijab tersebut dihadiri oleh Anggota VI BPK RI, Rizal Djailil, Gubernur Sulawesi Tenggara, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Tenggara, Kepala Daerah, Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, pimpinan SKPD pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kota Kendari. Setelah prosesi selesai, rangkaian acara dilanjutkan dengan penyampaian sambutan oleh Anggota VI BPK RI dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan pemberian ucapan selamat dari para undangan.



Redaksi Kabarano mengucapkan :
SELAMAT TAHUN BARU 2014
SEMOGA KESUKSESAN SELALU MENYERTAI KITA
DALAM MENGABDI KEPADA NUSA,
BANGSA DAN NEGARA

MEDIA VISIT ANGGOTA IV BPK RI DI SULAWESI TENGGARA



Pada tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013, Anggota IV BPK RI, Ali Masykur Musa, mengadakan kunjungan kerja di wilayah Sulawesi Tenggara. Dalam kunjungan kerja selama dua hari tersebut, anggota IV mengikuti beberapa kegiatan, diantaranya pengarahan di BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, media visit dengan media massa Sulawesi Tenggara serta tatap muka dengan nelayan Sulawesi Tenggara.

Pengarahan Anggota IV kepada pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan di Aula Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam kegiatan tersebut, Anggota IV memberikan motivasi agar pelaksana BPK dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berikutnya, Anggota IV memberikan materi selaku

keynote speaker pada workshop pengelolaan pertambangan yang dilaksanakan di Aula Mokodompit Universitas Haluoleo Kendari. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan tanya jawab dengan peserta workshop.

Agenda berikutnya adalah media visit yang dilaksanakan di Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sulawesi Tenggara dan Harian Kendari Pos. Media visit di LPP TVRI disertai dengan dialog publik seputar pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun media visit di Harian Kendari Pos diisi dengan dialog antara Anggota IV yang didampingi dengan pejabat struktural BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pimpinan dan redaktur harian Kendari Pos di gedung Graha Pena Kendari. Dalam media visit di Harian Kendari Pos, Anggota IV banyak mendapatkan pertanyaan seputar pengelolaan pertambangan khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara.



Rapat Koordinasi Upaya Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pencegahan Kerugian Negara



Dalam rangka mendorong pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Tenggara dan pencegahan kerugian negara, BPK mengadakan Rapat Koordinasi Upaya Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Pencegahan Kerugian Negara pada tanggal 27 Agustus 2013, bertempat di Swiss-belhotel Kendari. Acara ini dihadiri oleh Anggota VI BPK RI, Rizal Djalil, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Andi Rahmat, dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam.

BPK mengundang seluruh kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain kepala daerah, BPK juga mengundang inspektur dan kepala Biro/BPKAD/DPPKAD se-Provinsi Sulawesi Tenggara, serta seluruh kepala dinas pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kota Kendari untuk menghadiri rapat koordinasi tersebut.

Gubernur Sulawesi Tenggara, dalam sambutannya antara lain menyampaikan kemajuan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam bentuk sensus aset dan pembentukan majelis TPKN untuk menyelesaikan permasalahan sisa Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan. Gubernur Sulawesi Tenggara juga menyampaikan harapannya agar BPK dapat melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah sehingga nantinya pemerintah daerah di

Sulawesi Tenggara dapat memperoleh opini yang lebih baik. Selanjutnya Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menyampaikan pemaparan mengenai proses penganggaran pendapatan dan belanja di DPR RI serta dinamika-dinamika yang muncul dalam proses penganggaran tersebut.

Agenda terakhir dari rapat koordinasi ini adalah pemaparan dari Anggota VI BPK RI, yang mendorong pemerintah daerah untuk mendapatkan opini yang lebih baik dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi BPK. Selain itu Anggota VI juga menyarankan agar pemerintah daerah memanfaatkan BPKP untuk asistensi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Diharapkan dengan adanya rapat koordinasi ini, pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Tenggara dapat lebih serius dan mempercepat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini diharapkan para pelaksana dan pengelola keuangan di daerah agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kerugian negara atas pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya.



Upacara HUT RI Ke-68



Tanggal 17 Agustus 2013, genap 68 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka dari penjajahan. Kemerdekaan tersebut diraih dengan pengorbanan dari para pahlawan. Sebagai wujud penghargaan atas jasa-jasa para pahlawan bangsa, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara melangsungkan upacara bendera yang dilaksanakan di halaman kantor dan diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bertindak selaku Inspektur upacara pada peringatan HUT BPK adalah Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sambutan Ketua BPK yang dibacakan oleh Kepala Perwakilan diantaranya menekankan kepada para pemeriksa BPK agar mewaspadai penyimpangan penggunaan anggaran yang diduga dilakukan untuk kepentingan pemenangan partai tertentu dalam pemilihan umum tahun 2014. Ketua BPK menghimbau agar seluruh unsur di BPK bekerja keras melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalisme. Ketua BPK juga menghimbau agar anggaran yang dipakai untuk melaksanakan tugas yang diemban dapat dipergunakan secara efisien, efektif, dan tidak dikorupsi.

PELANTIKAN PNS PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Tanggal 12 Desember 2013, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tenggara melantik dan mengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2013. Pengangkatan PNS tersebut didasarkan pada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 385/K/X-X.3/11/2013 dan Nomor 351/K/X-X.3/10/2013 tentang

pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Strata 1/Diploma III STAN menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Tahun Anggaran 2013, PNS yang dilantik di perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berjumlah tiga orang yakni Hadiyanto Dedy Setyawan, S.Kom. dari Universitas Diponegoro; Rini Mayangsari, S.E. dari UPN "Veteran" Yogyakarta dan Rifki Ahmad Pratama dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). PNS yang dilantik tersebut sebelumnya sudah melaksanakan pekerjaan dengan status CPNS di perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Redaksi Kabarano mengucapkan selamat dan sukses kepada rekan-rekan PNS yang dilantik. Semoga dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat terhadap institusi BPK pada umumnya dan khususnya kepada perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II TAHUN 2013



Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara TA 2012. Tanggal 7 Juli 2012, dengan Opini Tidak Memberikan Pendapat.

Penyerahan LHP Kinerja RSUD Bahtermas dan LHP Kinerja Pengelolaan PKB dan BBN KB Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tanggal 28 Oktober 2013



Penyerahan LHP Pengelolaan Belanja Hibah Pemilukada KPU dan LHP Kinerja Pendidikan Kabupaten Bombana. Tanggal 29 Oktober 2013



Penyerahan LHP Kinerja Perizinan Kabupaten Konawe. Tanggal 29 Oktober 2013



Penyerahan LHP Belanja Hibah Pemilukada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Tanggal 23 Desember 2013

Selain penyerahan LHP tersebut di atas, selama semester II Tahun 2013 BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara juga menyerahkan:

1. LHP Belanja Hibah Pemilukada Kota Kendari (29-10-2013);
2. LHP Belanja Hibah Pemilukada Kab. Kolaka Utara (23-12-2013);
3. LHP Pendapatan Asli Daerah Kab Kolaka Utara (23-12-2013); dan
4. LHP Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wakatobi (23-12-2013).